



Zona Mutu SMP Sisakan Banyak Kuota

JOGJA—Calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) memilih melihat persaingan nilai sebelum memutuskan memverifikasi pendaftaran.

Lugas Subarkah & Uli Febriani
redaksi@harianjogja.com

Akibatnya, pada hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Kota Jogja untuk jalur zona mutu masih menyisakan banyak kuota. Bahkan, belum ada satu pun SMP negeri yang sudah memenuhi kuota untuk jalur persaingan nilai USBN tersebut.

Dari 16 SMP negeri di Kota Jogja, hanya SMP Negeri 15 yang hampir memenuhi kuota yang ditetapkan yaitu sebanyak 169 siswa. "Sampai siang ini [kemarin], sudah ada 160 siswa yang mendaftar untuk zona mutu. Sedangkan untuk siswa dari zona luar daerah ada 10 orang dan untuk siswa dari jalur Kartu Menuju Sehat [KMS] sudah ada 43 pendaftar," kata Kepala SMP Negeri 15 Siti Arina Budi

- ▶ Sejumlah kuota untuk peserta didik di SMPN 5 Jogja ditinggalkan oleh pemiliknya.
- ▶ PPDB SMP di Kulonprogo diwarnai sejumlah masalah.

Astuti, Senin (1/7).

Menurut dia, persaingan yang lebih ketat pada PPDB di SMPN 15 justru terjadi di jalur KMS atau siswa dari keluarga miskin Kota Jogja. Jumlah pendaftar pada hari pertama sudah melebihi kuota yang ditetapkan yaitu 34 siswa. "Siswa KMS dengan nilai ujian sekolah berstandar nasional [USBN] yang lebih rendah terpaksa harus terlempar dari SMP Negeri 15 Jogja. Biasanya, banyak siswa KMS yang memang mendaftar ke sini karena kuota yang disiapkan banyak," katanya.

Siti menyebut jika kuota untuk siswa KMS tidak terpenuhi, sisa kuota tersebut akan otomatis dialihkan untuk menambah kuota dari zonasi mutu.

Pejabat Humas dan Informasi PPDB SMPN 5 Jogja, Sujiyana mengatakan sejumlah kuota untuk peserta didik di SMPN 5 Jogja

ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga menjadi kuota kosong. Ada satu siswa yang tidak melakukan lapor diri, berasal dari jalur zonasi wilayah. Demikian juga untuk jalur bibit unggul, ada dua siswa yang tidak melakukan lapor diri. "Kuota yang kosong akan dialihkan untuk kuota zonasi mutu. Apabila kuota untuk siswa KMS tidak terpenuhi, maka sisa kuota tersebut akan dialihkan untuk zonasi mutu," ungkapnya.

Di SMPN 5 Jogja, ada sebanyak 32 kuota siswa bagi KMS, tetapi hingga Senin pukul 12.00 WIB, baru ada satu peserta mendaftar. Adapun kuota untuk siswa dari keluarga tidak mampu di SMPN 5 yakni sebanyak 32 siswa. "Kuota untuk KMS ada 32 siswa, hingga siang ini [kemarin] yang daftar jalur KMS baru satu siswa," jelasnya.

Ia menjelaskan total daya tampung SMPN 5 Jogja yakni 320 siswa, terdiri dari 32 untuk jalur bibit unggul, 96 siswa untuk jalur zonasi wilayah, 128 untuk jalur zonasi mutu, 32 siswa untuk jalur KMS, 16 siswa untuk jalur prestasi dan 16 siswa untuk jalur perpindahan tugas orang tua.

▶ Halaman 6

Zona Mutu...

Sementara itu, di 15 SMP negeri lain di Kota Jogja masih menyisakan lebih dari separuh kuota zona mutu dan juga zona KMS. Proses verifikasi berkas PPDB jenjang SMP negeri di Kota Jogja akan dilakukan hingga Rabu (3/7). "Kami memberikan banyak pilihan jalur pendaftaran kepada calon siswa. Mulai dari bibit unggul sekolah, zonasi jarak, hingga zonasi mutu," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Budhi Ashrori.

Ia berharap banyaknya pilihan jalur pendaftaran yang bisa dipilih calon siswa asal Kota Jogja tersebut tidak lagi menyisakan permasalahan yang terjadi saat PPDB SMP tahun lalu yaitu adanya *blank spot* sehingga ada siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri karena jarak rumah ke sekolah jauh.

Sedangkan masih banyaknya sisa kuota pada PPDB hari pertama, dinilai disebabkan banyak calon siswa yang memilih melihat persaingan nilai sebelum memutuskan memverifikasi pendaftaran. Total kuota pada PPDB SMP negeri di Kota Jogja pada tahun ajaran 2019/2020 ditetapkan sebanyak 3.462 siswa.

Siswa Miskin

Koordinator Forum Pemantau Independen Kota Jogja Baharudin Kamba menyoroti PPDB dari zona KMS karena kondisi calon siswa tidak menunjukkan berasal dari keluarga miskin.

"Ada beberapa yang mengendarai sepeda motor dengan harga yang cukup mahal. Ada pula siswa yang membawa telepon selular dengan spesifikasi bagus yang harganya cukup mahal," katanya.

Ia menuturkan di SMPN 4 Jogja proses verifikasi dan pendaftaran berjalan lancar. Hanya saja ia menemukan sejumlah keganjilan seperti orang tua bersama calon siswa datang menggunakan sepeda motor N-Max, padahal masuk jalur keluarga miskin.

Di SMPN 15 Jogja, ditemukan sejumlah calon siswa yang membawa

ponsel dengan seri yang tergolong mahal. "Untuk memastikan apakah mereka pemegang KMS kami menghampiri dan ternyata benar pemegang kartu KMS," ungkapnya.

Temuan tersebut akan disampaikan ke Pemerintah Kota Jogja agar ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga dalam pendataan keluarga miskin bisa dilakukan lebih cermat.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, Kamba mengatakan akan menyampulkannya ke Wali Kota Jogja untuk dilanjutkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. "Artinya agar bisa ada perbaikan dalam pendataan penerima kartu KMS pada tahun yang akan datang," ujarnya.

Antrean Panjang

PPDB SMP di Kulonprogo pada Senin, diwarnai sejumlah masalah. Mulai dari adanya wali murid calon siswa yang belum memahami tata cara mendaftar hingga sulitnya mengakses sistem pendaftaran *online*. Kepala SMPN 2 Wates, Turismiyati mengatakan pada hari pertama PPDB, terdapat sejumlah calon wali murid yang masih kebingungan ihwal teknis pendaftaran di sekolah yang menampung sebanyak 128 calon siswa baru itu.

Rata-rata para wali murid ini, belum memahami berkas apa yang harus dibawa dalam mendaftarkan anak maupun kerabat mereka. "Mereka juga masih kebingungan soal pendaftaran *online*, ada yang tanya harus ambil token atau tidak. Tapi jumlahnya tidak banyak, lebih banyak yang sudah paham," kata dia.

Kepala SMPN 1 Galur, Sugeng Widadi mengatakan sistem pendaftaran *online* di *website Kulonprogo.siap-ppdb.com* sempat tidak bisa diakses sejak Minggu (30/6) malam. Pendaftaran baru bisa dilakukan pada Senin (1/7) pagi. "Dari informasi wali murid yang mendaftar *online*, baru bisa dilakukan tadi pagi sekitar jam

04.00 WIB," kata saat dikonfirmasi awak media.

Akibatnya banyak wali murid yang hendak mendaftarkan anak atau kerabatnya ke SMPN 1 Galur tidak membawa berkas pendaftaran *online*. Kondisi ini menimbulkan antrean panjang.

Kondisi yang sama juga terjadi di Cuningkidul, Kepala SMPN 1 Wonosari, Muhammad Nurhadi, mengatakan pada hari pertama dibukanya PPDB masih ada beberapa wali murid yang bingung terkait alur pendaftaran.

Harus Jalan Terus

Anggota Ombudsman Pusat Ahmad Su'adi menyebut penerapan sistem zonasi dalam PPDB sebagai hal yang baik karena memaksa pemerintah daerah meratakan mutu pendidikan. Sistem ini harus jalan terus.

"Sejak merdeka pendidikan dikelola secara sentralistik, oleh sebab itu sistem zonasi bisa memberikan pemerataan pendidikan bagi masyarakat," kata dia.

Namun, dia mengatakan masih ada banyak kekurangan dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB yang baru berjalan tiga tahun, terutama dalam hal sebaran sekolah dan guru.

Guna mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat sebaran sekolah yang belum merata, menurut dia, pemerintah daerah harus bertanggung jawab menyalurkan peserta didik yang belum mendapatkan sekolah.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah daerah sudah memiliki peta sebaran sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, supaya para orang tua murid bisa menggunakannya sebagai acuan dalam menentukan pilihan sekolah untuk anak.

Di luar masalah itu, Ahmad berpendapat pelaksanaan sistem zonasi juga bisa menekan angka jual-beli bangku sekolah favorit, karena siswa diterima berdasarkan jarak terdekat dari sekolah. (JIBI/Rahmat Jiwandono, Jalu Rahman Dewantara/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005